



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2024

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Balung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Balung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Balung berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Balung. Kinerja Kecamatan Balung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2024.

Balung, 16 Januari 2025



KAMAT BALUNG

Mohamad Faridj Wadjudi
MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S. Sos
Pembina

NIP. 19700314 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BALUNG	5
E. SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN BALUNG	5
F. ANGGARAN KECAMATAN BALUNG	7
G. ISU STRATEGIS	9
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
C. PERJANJIAN KINERJA	18
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	22
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	22
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BALUNG	23
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	31
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	42
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	44
F. REALISASI ANGGARAN.....	50

BAB IV. PENUTUP.	54
-----------------------	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. Cascading**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Balung disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Balung tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Tahun 2021 - 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2024.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra Kecamatan Balung yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balung.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode 2021 s.d tahun 2026, yang meliputi :

- 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.*
- 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.*

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Balung tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong **Sangat Tinggi**.

- Sasaran 2* : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**.
Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 95% tergolong **Sangat Tinggi**.
- Sasaran 3* : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong **Sangat Tinggi**.
- Sasaran 4* : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Rendah**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 50% tergolong **Sangat Rendah**.
- Sasaran 5* : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian nilai 89,93 tergolong **Sangat**
- Sasaran 6* : **Tinggi**.
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 94% tergolong **Sangat Tinggi**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Balung telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 89% indikator capaiannya Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 98% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp 3.938.874.888,-. Sedangkan 2% merupakan Belanja Modal atau sebesar Rp. 85.978.700,-.

Sedangkan realisasi belanja Kecamatan Balung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.579.454.279,- atau 89% dari pagu anggaran.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kurangnya Kompetensi SDM
3. Sarana dan prasarana yang terbatas
4. Masyarakat kurang memahami pentingnya proses pemberdayaan
5. Kegagalan sistem seperti jaringan yang kurang bagus.
6. Adanya pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Semangat pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan
4. Meningkatkan keterampilan Masyarakat agar dapat memberikan penghasilan.
5. Memiliki pemikiran yang kreatif dan fleksibel.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Balung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Balung tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balung dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Balung adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Balung
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Kecamatan Balung

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Balung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Balung merupakan unsur unsur Perangkat Daerah
- (2) Kecamatan Balung dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- (3) Kecamatan Balung mempunyai tugas :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan Balung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;

- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Balung terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretaris Camat :
 - Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesos

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BALUNG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Balung yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Balung yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 15 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang atau 38 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Balung Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-
2. Pengawas	6	-	-	6	-	5	-	-	-	5	-	3	2
3. Pelaksana	16	6	-	10	-	8	1	4	-	3	-	-	8
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non ASN						14	-	9	-	5	-	10	4
Jumlah	24	6	-	18	-	29	1	13	-	15	-	15	14

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balung 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Balung belum memenuhi/sudah memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Balung.

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN BALUNG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan

ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Balung menempati gedung di Jl. Rambipuji No. 124 Balung.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Balung kurang memadai, karena perlu pemeliharaan rehabilitasi pada beberapa Gedung yang sudah tidak layak pakai. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Balung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Balung
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah	35	Baik	35
2	Gedung dan Banugunan	6	Baik	6
3	Jalan Kabupaten	2	Baik	2
4	Jalan Desa	30	Baik	30
5	AC	12	2 Rusak	12
6	Komputer	14	5 Rusak	14
7	UPS	8	Baik	8
8	Lemari Kayu	3	Baik	5
9	Lap Top	10	4 Rusak	10
10	Printer	23	11 Rusak	15
11	Mobil T 120 SS	1	Baik	1
12	Sepeda Motor Mega Pro	1	Baik	1
13	Mobil AVANZA	1	Baik	1
14	Sepeda Motor	9	Baik	9
15	Genset	1	Baik	1
16	Filing Kabinet	2	Baik	2
17	Handy Talky (HT)	8	Baik	8
18	Televisi	3	2 Rusak	3
19	Lemari Besi/Metal	11	Baik	11
20	Scanner	2	1 Rusak	2
21	Kipas Angin	9	Baik	9
22	Kulkas	1	Baik	1
23	Tangga Aluminium	1	Baik	1
24	Mesin Pemetong Rumput	2	1 Rusak	1
25	Podium	1	Baik	1
26	Sound System	2	Baik	4
27	Kursi Biasa	120	Baik	250
28	Meja Kerja	18	Baik	18
29	Lemari Kaca	2	Baik	2
30	Kursi besi (Tunggu)	3	Baik	3

31	Meja Kerja Kayu	5	Baik	5
32	Kursi Hadap	15	Baik	15
33	Kursi Sofa	3	Baik	3
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	5
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik	4
36	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik	2
37	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2	Baik	2
38	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	Baik	2
39	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	4	Baik	4
	Jumlah	383		508

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Balung Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN BALUNG

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Balung pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Balung memiliki 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.024.853.588,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Balung
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.912.131.188
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.500.113.588
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 93.960.000
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 39.506.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 39.506.000
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 159.224.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.690.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 96.340.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.043.200

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.899.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 36.250.800
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 130.550.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 60.351.448
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 55.198.752
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 82.737.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 25.411.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 33.523.900
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 23.802.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 624.314.100
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 567.611.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 567.611.800
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 56.702.300
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 56.702.300
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 180.383.100
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 180.383.100
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 7.220.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 173.162.300
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 308.025.200
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.761.200
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Rp. 7.761.200
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rp. 300.264.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 300.264.000
	JUMLAH	Rp. 4.024.853.588

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Balung Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Balung dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Balung dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah

daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa;

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Balung terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Selatan dengan Luas wilayah Kecamatan Balung adalah berkisar $\pm 48,18$ km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Rambipuji dan Bangsalsari;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Rambipuji;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Puger;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Umbulsari.

Jumlah penduduk di Kecamatan Balung sebanyak 84.240 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 42.208 Jiwa dengan persentase 50% penduduk perempuan 42.032 Jiwa dengan persentase 50%. penduduk Kecamatan Balung memiliki mata pencaharian antara lain :

- a. Bidang pertanian 13,19 % sebanyak 11.112 jiwa
- b. Aparatur pejabat negara 0,88 % sebanyak 739 jiwa
- c. Pengangguran 27,81 % sebanyak 23.429 jiwa
- d. Tenaga Pengajar 1,02 % sebanyak 857 jiwa
- e. Wiraswasta 26,39 % sebanyak 22.235 jiwa
- f. Nelayan 0,05 % sebanyak 46 jiwa
- g. Pelajar 10,88 % sebanyak 9.162 jiwa
- h. Agama dan kepercayaan 0,06 % sebanyak 50 jiwa
- i. Tenaga Kesehatan 0,18 % sebanyak 149 jiwa
- j. Pensiunan 0,26 % sebanyak 223 jiwa
- k. Bidang lainnya 18,09 % sebanyak 15.238 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Balung membawahi 8 desa yaitu:

1. Desa Balunglor
2. Desa Balungkulon
3. Desa Balungkidul
4. Desa Tutul
5. Desa Karangsemanding
6. Desa Karangduren
7. Desa Curahlele
8. Desa Gumelar

Sumber Data : Kecamatan Balung Dalam Angka (BPS)

Di Kecamatan Balung terdapat beberapa Desa yang mempunyai Perkembangan sentra industri yaitu :

- Desa Tutul sebagai desa sentra industri Handycraft, Tasbih dan Manik-manik.
- Desa Balungkulon sentra industri Gendang/ketipung dan UMKM pembuatan kerupuk
- Desa Balunglor UMKM hasil produksi Roti O
- Desa Curahlele sentra industri tusuk sate
- Desa Gumelar sentra industri suwar suwir

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Balung merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Balung Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Balung yaitu

Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah.

Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Sasaran RPJMD:

- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Balung adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Indikator Tujuan 1 : Nilai Sakip OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Balung tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	93	93	93	94	94
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%	90%	95%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Rencana Strategis Kecamatan Balung tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

<p>Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>
<p>Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat</p>	<p>Seksi Trantib</p>	<p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan</p>

		pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laport ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Balung No. 065/22/35.09.10/2024 tentang Indikator Kinerja Utama

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung tahun 2024

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 624.314.100 Sumber Dana : APBD
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp. 180.383.100 Sumber Dana : APBD
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indicator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum Rp. 308.025.200 Sumber Dana : APBD
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.912.131.188 Sumber Dana : APBD
- Jumlah** **Rp. 4.024.853.588**

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Balung terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh 3 (tiga) program dengan anggaran Rp. 1.112.722.400, yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 28% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Balung
- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
Didukung oleh :
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 624.314.100
 Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 624.314.100 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 16% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Balung.
- c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Didukung oleh :
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 180.383.100

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 180.383.100 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 4% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Balung.

- d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 308.025.200

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 308.025.200 yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 8% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Balung.

- e) Sasaran Strategis V : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien didukung 1 (satu) program dengan anggaran Rp. 2.912.131.188, yang dialokasikan untuk sasaran V adalah sebesar 72% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Balung

- f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.912.131.188

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 2.912.131.188 yang dialokasikan untuk sasaran VI adalah sebesar 72% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Balung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Balung dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Balung menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BALUNG

Kecamatan Balung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Balung tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Balung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4	4	100%	4	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	88	95%	94	94%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85	100	100%	95	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	50	50%	100	50%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	69	89,93	100%	75	100%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100	94	94%	100	94%

Sumber Data Realisasi : *Kasi Pelum, Kasi Trantib, Kasi PMKS, Kasi Pemerintahan, Kasubbag Umpeg dan Kasubbag perencanaan*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (empat) 4 indikator sasaran Kecamatan Balung rata rata mencapai 89% dan masuk dalam kategori tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan lebih rendah hal ini disebabkan karena ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang semula direncanakan akan dialihkan akan tetapi tidak ada perubahan anggaran sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Balung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemerintahan secara

baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balung tahun 2021-2026

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Sasaran 1 :

berdasarkan data realisasi program Kecamatan Balung th 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =

$$\frac{\text{Capaian IK program yang tercapai}}{\text{Target IK program}} \times 100\% = 100\%$$

Angka realisasi ini sudah mencapai target tahun 2024

Realisasi sasaran 2 :

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Balung per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 88, dimana IKM tersebut belum mencapai target IKM di tahun 2024

Realisasi sasaran 3 :

berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat , maka realisasi indikator sasaran 3 sbb

Persentase fasilitasi kesmas yang dilaksanakan =

$$\frac{\text{Capaian keg fasilitasi yang dilaksanakan}}{\text{Target keg. fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kegiatan kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang direncanakan di tahun 2024 antara lain:

1. Verifikasi laporan data Guru ngaji, proposal dan pengajuan dispen nikah
2. Penyaluran Bansos PKH melalui Bank Mandiri kepada 1.764 KK
3. Pelatihan dalam toga menjadi jamu instan dan kudapan
4. Penyaluran Bantuan Pangan Beras dari Badan Pangan Nasional kepada 4.329 Keluarga Penerima Manfaat
5. Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada 2.422 Warga

6. Pendampingan Tenaga Puskesmas untuk kegiatan Survei Status Gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenkes
7. Pengkoordinasian tenaga Kesehatan pada anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebanyak 861 orang di 123 TPS
8. Lokakarya Mini di lingkungan Kecamatan Balung tiap Bulan yang dilaksanakan oleh Puskesmas ataupun Koordinator PLKB
9. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Giat Anak Asuh Stunting kepada 98 anak oleh ASN di wilayah Kecamatan Balung
10. Rembuk stunting di 8 Desa dan Kecamatan
11. Pemberian susu formula kepada 200 balita
12. Pemberian susu formula kepada 188 bumil KEK dan RESTI
13. Penyuluhan Penurunan Stunting
14. Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting
15. Pertemuan tim akselerasi upaya penurunan AK1, AKB Tingkat Kecamatan
16. Sosialisasi kehidupan berkoperasi

Realisasi sasaran 4 : berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat kecamatan Balung tahun 2024, maka realisasi indikator sasaran 4 sbb

Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan =

$$\frac{\text{Capaian laporan yang terselesaikan}}{\text{Target laporan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% = 50\%$$

Target laporan pelanggaran yang masuk

Menunjukkan bahwa penyelesaian laporan pelanggaran trantibum di Kecamatan Balung sudah optimal, sesuai ketentuan dan SOP yang ada

Laporan pelanggaran trantibum di tahun 2024 antara lain :

- Laporan masyarakat adanya bangunan gereja yang bersebelahan dengan pekarangan rumah ibu ernawati dengan ketinggian \pm 9 meter di desa balunglor sebanyak 1 (satu) laporan.
- Laporan adanya usaha ayam petelur milik H. Amsori di dusun maduran Desa Tutul sebanyak 1 (satu) laporan.

- Laporan penutupan akses jalan menuju sekolah oleh takmir masjid Nurul Islam di dusun Padukuhanlor Desa Karangsemanding sebanyak 1 (satu) laporan.

Seluruh laporan telah terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja sasaran strategi ditahun 2024 yaitu 50% menunjukkan capaian yang sangat rendah, hal ini disebabkan kegiatan pembinaan linmas tidak dapat dilaksanakan karena adanya himbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan warga Masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada.

Realisasi Sasaran 5 :

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen sakip Kecamatan Balung tahun 2024 nilai sakip Kecamatan Balung sebesar 89,93, dimana nilai sakip tersebut sudah mencapai target nilai sakip di tahun 2024.

Realisasi Sasaran 6 :

berdasarkan data realisasi program Kecamatan Balung th 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =

$$\frac{\text{Capaian IK program yang tercapai}}{\text{Target IK program}} \times 100\% = 94\%$$

Target IK program

Angka realisasi ini belum mencapai target tahun 2024

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4	4	4	4
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,21	90,24	83,28	88
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	93%	100%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	50%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	64	64	80	89,93
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	94%

Sumber Data Realisasi: Kasi Pelum, Kasi Trantib, Kasi PMKS, Kasi Pemerintahan, Kasubbag Umpeg dan Kasubbag perencanaan

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan bahwa Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah telah terealisasi sejak kurun waktu tahun 2022 s/d 2024 sesuai dengan target.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan IKM Kecamatan Balung tren peningkatan sejak kurun waktu tahun 2021 s/d 2022 dan ditahun 2023 IKM mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2023, dan ditahun 2024 mengalami penurunan karena ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan pembinaan linmas tidak dapat dilaksanakan karena adanya himbuan dilarang ada kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa menjelang pilkada.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan Nilai Sakip Kecamatan Balung tren peningkatan sejak kurun waktu tahun 2023 s/d 2024.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2023, dan ditahun 2024 mengalami penurunan karena terdapat kesalahan kode rekening yang seharusnya masuk dalam belanja modal, rencana akan dialihkan untuk kegiatan yang lain tidak ada pergeseran anggaran.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Balung dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Provinsi / Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	87,33 (IKM Kab. Jember)	-
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	-	-
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	50%	-	-
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai Sakip OPD	89,93 (nilai SAKIP Kec. Balung)	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	

6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	94%	-	-
---	---	--	-----	---	---

Sumber Data: dari keempat indikator di Kecamatan data realisasi nasional tidak tersedia.

Dari enam indikator Kecamatan Balung, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Balung tahun 2024 lebih tinggi sebesar 2,67 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Balung cukup optimal dan mendukung kualitas pelayanan publik prima di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Balung tahun 2024 lebih tinggi 27,43 Poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Rp. 1.112.722.400	Rp. 1.052.975.000	95%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Program A. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			

dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Kegiatan A.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 567.611.800	Rp. 565.605.000	100%
	Kegiatan A.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 56.702.300	Rp. 51.870.000	91%
Total		Rp. 624.314.100	Rp. 617.475.000	99%
Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program B Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Kegiatan B.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 7.220.800	Rp. 6.085.000	84%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 173.162.100	Rp. 153.855.000	89%
Total		Rp. 180.383.100	Rp. 159.940.000	89%

Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Balung	Program C Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan C.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 7.761.200	Rp. 0	0
	Kegiatan C.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 300.264.000	Rp. 275.560.000	92%
Total		Rp. 308.025.200	Rp. 275.560.000	89%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien		Rp. 2.912.131.188	Rp. 2.526.478.779	87%
Sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program D Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			

	Kegiatan D.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.406.153.588	Rp. 2.131.089.951	89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 93.960.000	Rp. 93.960.000	100%
	Kegiatan D.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 39.506.000	Rp. 26.670.000	68%
	Kegiatan D.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.690.300	Rp. 6.450.000	67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 96.340.800	Rp. 92.146.425	96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.043.200	Rp. 5.965.200	99%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 10.899.000	Rp. 10.390.500	95%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 36.250.000	Rp. 18.436.000	51%
	Kegiatan D.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 60.351.448	Rp. 45.986.382	76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.000.000	Rp. 12.591.000	84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 55.198.752	Rp. 32.998.000	60%
	Kegiatan D.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 25.411.400	Rp. 23.610.800	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 33.523.900	Rp. 26.184.521	78%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 23.802.000	Rp. 0	0
Total		Rp. 2.912.131.188	Rp. 2.526.478.779	87%

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. **Program** : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	567.611.800	565.605.000
Output	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat Pembinaan perangkat desa dan Pembinaan tertib administrasi desa, Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pemberian Honorarium RT/RW. Tujuan dari Pembinaan perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat, tepat dan benar. Untuk pembinaan tertib administrasi desa bertujuan agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, kualitas pelaporan dan meningkatkan kedisiplinan. Sedangkan evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian pelunasan pajak di wilayah Kecamatan Balung, Capaian realisasi kegiatan ini mencapai 100%.

Foto Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sbb :



Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	56.702.300	51.870.000
Output	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10.000	11.668

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi seksi pelayanan umum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memenuhi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Realisasi capaian kegiatan mencapai 91%, tidak mencapai 100% karena efisiensi.

Foto Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sbb :



2. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.220.800	6.085.000
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5	5

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat Pra Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, tujuan dilaksanakannya musrenbang Tingkat Kecamatan untuk Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan lintas desa atau bukan kewenangan desa sesuai DU RKP Desa di wilayah kecamatan. Kegiatan ini capaian realisasi mencapai 84%, tidak mencapai 100% karena efisiensi belanja.

Foto Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sbb :



Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	173.162.300	153.855.000
Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	10

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pemberian makanan Tambahan bumil dan balita; Penyuluhan Penurunan Stunting; Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting; Sosialisasi kehidupan berkopras; Buka Bersama (safari ramadhan); Halal Bi Halal. Tujuan pemberian susu kepada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayi selama kehamilan. Sedangkan pemberian susu pada balita stunting untuk Memastikan kebutuhan gizi tercukupi hal ini merupakan salah satu cara mencegah stunting. Sedangkan acara berbuka Bersama bertujuan sebagai pengingat untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dan untuk mempererat tali silaturahmi, sedangkan untuk kegiatan halal bihalal bertujuan agar kita sebagai umat islam saling bermaaf-maafan dan menyambung kembali hubungan yang mungkin terputus, juga menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga keharmonisan di antara umat Islam. Kegiatan ini capaian realisasi mencapai 89% Capaian tidak mencapai 100%, selain karena efisiensi belanja juga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Foto Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



VvdDFb.ina



3. Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	7.761.200	0
Output	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	0

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pembinaan Linmas; dan Lomba Pendidikan Baris Berbaris (PBB) Linmas. Akan tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan rencana akan digeser atau dialihkan pada kegiatan lain, tetapi karena tidak ada pergeseran anggaran maka kegiatan tidak terealisasi.

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	300.264.000	275.560.000
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	13	13

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pembayaran honorarium tenaga Banpol PP dan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Upacara HUT RI ke 79. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memupuk rasa cinta tanah air dengan mengingat perjuangan para pahlawan. Realisasi capaian mencapai 92% Capaian tidak mencapai 100%, karena efisiensi belanja.

Foto Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Balung berjumlah 15 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.024.853.588, melaksanakan 4 (empat) program 10

(sepuluh) kegiatan dan 20 (duapuluh) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	88%	95%	Tidak Efisien
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	95%	99%	Tidak Efisien
3. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	89%	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	50%	89%	Tidak Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	94%	87%	Efisien
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	94%	87%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dapat

dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung dapat dikategorikan Tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Balung menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	100%	V				

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						
Indikator 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	√				
Rata rata capaian	95%	√				
Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan						
Indikator 2.1 Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Sasaran 3 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan						
Indikator 3.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	50%				√	
Rata rata capaian	50%				√	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	89,93	√				
Sasaran 4 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Indikator 4.1 Persentase Indikator Program yang tercapai	94%	√				
Rata rata capaian	94%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian 100 %,

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 95 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain : a. Standar pelayanan prosedur (SOP) b. Kepuasan Masyarakat c. Semangat pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik d. Sikap pegawai yang baik (professional) e. sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah : Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang petunjuk teknis pelayanan; Kurangnya sumber daya manusia (SDM); Kurangnya Kompetensi SDM; Kurangnya kolaborasi antar instansi; Sarana dan prasarana yang terbatas
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Berkomitmen untuk melakukan perubahan; Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai; Pelatihan yang intensif bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme; Melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi.
- Rencana perbaikan kedepan Peningkatan Kapasitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik, Sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan publik.

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara Pemerintah, Perwakilan masyarakat (melalui RT/RW), media lokal, dan LSM lokal untuk Saling mendukung dan saling mengawasi dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%. Faktor Keberhasilan yang diraih didukung oleh Upaya sinergi, koordinasi, kolaborasi dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait yaitu : Kecamatan Balung berinovasi dan berkolaborasi dengan pihak Kesehatan yaitu Rumah Sakit Balung, Puskesmas Balung dan Puskesmas Karangduren dalam program penurunan stunting dengan kegiatan pemberian makanan tambahan berupa susu bagi Balita stunting dan ibu hamil Resiko Tinggi. Selain pemberian makanan pada balita dan bumil Resti Kecamatan Balung juga mengadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk penurunan stunting di wilayah Kecamatan Balung. Adapun keberhasilan dari kegiatan tersebut yaitu adanya penurunan prevalensi dari 9,1% menurun menjadi 7,5% di wilayah puskesmas balung, sedangkan untuk wilayah puskesmas Karangduren masih tetap belum ada perubahan. Untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Balung melaksanakan kegiatan Pelatihan dalam toga menjadi jamu instan dan kudapan serta sosialisasi kehidupan berkooperasi.

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain : a. Motivasi dari Masyarakat, b. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program, c. Kerjasama yang baik, d. Fasilitas yang tersedia.
- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain : Akses terbatas; Kurangnya komitmen; Kurangnya koordinasi; Terbatasnya sumber daya manusia (SDM); Keterbatasan modal.

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah a. Meningkatkan keterampilan Masyarakat agar dapat memberikan penghasilan b. Membangun kelembagaan untuk pemberdayaan Masyarakat c. Mengembangkan usaha produktif d. Memanfaatkan teknologi digital
- Rencana perbaikan kedepan adalah - Mengumpulkan pengetahuan tentang pola kehidupan Masyarakat; - Identifikasi tokoh Masyarakat, - Komunikasi terhadap masalah yang ada, - mendorong dan merangsang inisiatif, - menetapkan skala prioritas, - membangun rasa percaya diri Masyarakat, - menetapkan program, - meningkatkan kapasitas Masyarakat - Tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan, - meningkatkan kapasitas dan kemandirian.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Kecamatan Balung Bersama dinas terkait berupaya menggerakkan perekonomian, dimana di Kecamatan Balung telah berkembang sentra industri kecil, yaitu : Desa Tutul sebagai desa sentra industri Handycraft, Tasbih dan Manik-manik.
 - a. Desa Balungkulon sentra industri Gendang/ketipung dan UMKM pembuatan kerupuk
 - b. Desa Balunglor UMKM hasil produksi Roti O
 - c. Desa Curahlele sentra industri tusuk sate
 - d. Desa Gumelar sentra industri suwar suwir

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kecamatan Balung akan melaksanakan monitoring untuk memberikan dorongan, membangun rasa percaya diri Masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mencapai predikat sangat rendah yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 50 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan pendukung, dan

kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena situasi kondisi politik menjelang pilkada, rencana kegiatan akan dialihkan untuk belanja barang jasa tetapi tidak ada pergeseran anggaran sehingga anggaran tidak terealisasi sesuai rencana.

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain a. Peningkatan kuantitas dan ketrampilan SDM Satpol PP b. Partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah a. Mengaktifkan poskamling b. Mentaati norma dalam Masyarakat c. Toleransi antar masyarakat
- Rencana perbaikan kedepan a. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, b. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, c. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan atau peraturan kepala daerah, d. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Satpol PP Kecamatan Balung bersinergi dengan jajaran samping yaitu polsek dan koramil untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah, serta berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian 89,93.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai

capaian rata – rata 94%, hal ini berkat kerja sama yang baik antara masing-masing seksi, Kasubbag dilingkup Kecamatan Balung.

- Penyebab keberhasilan adalah Kompetensi pegawai, suasana kerja dan lingkungan kerja yang baik, peluang pengembangan karier. Adapun penghambat pencapaian kinerja adalah a. Komunikasi yang kurang baik b. konflik antara pegawai c. Kurangnya disiplin d. Motivasi kerja e. Gaji dan insentif f. Lingkungan kerja g. Kegagalan sistem seperti jaringan yang kurang bagus.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan dominan masalah, memiliki pemikiran yang kreatif dan fleksibel, berkolaborasi dengan orang lain, dan memiliki waktu yang cukup untuk didedikasikan untuk memecahkan masalah.
- Rencana perbaikan kedepan apa Fokus pada pekerjaan, jaga Kesehatan, gunakan waktu kerja secara maksimal, berkolaborasi, bangun system komunikasi yang efektif, Evaluasi kinerja secara berkala, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, berikan pelatihan atau training kerja yang relevan dan berikan penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi karyawan.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balung pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.024.853.588,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.938.874.888,- terealisasi sebesar Rp. 3.500.499.279,- (89%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 85.978.700,- terealisasi sebesar Rp. 78.955.000,- (92%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Balung Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.912.131.188	Rp. 2.526.478.779	87%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.500.113.588	Rp. 2.131.089.951	89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.406.153.588	Rp. 2.131.089.951	89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 93.960.000	Rp. 93.960.000	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 39.506.000	Rp. 26.670.000	68%
	Sub Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 39.506.000	Rp. 26.670.000	68%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 159.224.100	Rp. 133.388.125	84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.690.300	Rp. 6.450.000	67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 96.340.800	Rp. 92.146.425	96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.043.200	Rp. 5.965.200	99%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.899.000	Rp. 10.390.500	95%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 36.250.000	Rp. 18.436.000	51%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 130.550.200	Rp. 91.575.382	70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 60.351.448	Rp. 45.986.382	76%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.000.000	Rp. 12.591.000	84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 55.198.752	Rp. 32.998.000	60%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 82.737.300	Rp. 49.795.321	60%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 25.411.400	Rp. 23.610.800	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 33.523.900	Rp. 26.184.521	78%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 23.802.000	Rp. 0	0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 624.314.100	Rp. 617.475.000	99%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 567.611.800	Rp. 565.605.000	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 567.611.800	Rp. 565.605.000	100%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 56.702.300	Rp. 51.870.000	91%
	Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 56.702.300	Rp. 51.870.000	91%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 180.383.100	Rp. 159.940.000	89%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 180.383.100	Rp. 159.940.000	89%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 7.220.800	Rp. 6.085.000	84%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 173.162.100	Rp. 153.855.000	89%
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 308.025.200	Rp. 275.560.500	89%
3.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.761.200	Rp. 0	0
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 7.761.200	Rp. 0	0
3.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rp. 300.264.000	Rp. 275.560.500	92%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 300.264.000	Rp. 275.560.000	92%
	JUMLAH	Rp. 4.024.853.588	Rp. 3.579.454.279	89%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Balung Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Balung ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Balung sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Balung disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Balung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 4 (empat) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai target dengan kategori sangat rendah

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kurangnya Kompetensi SDM
3. Sarana dan prasarana yang terbatas
4. Masyarakat kurang memahami pentingnya proses pemberdayaan
5. Kegagalan sistem seperti jaringan yang kurang bagus.
6. Adanya pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Semangat pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan
4. Meningkatkan keterampilan Masyarakat agar dapat memberikan penghasilan.
5. Memiliki pemikiran yang kreatif dan fleksibel.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Pelatihan yang intensif bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dan profesional
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Melaksanakan monitoring untuk memberikan dorongan, membangun rasa percaya diri Masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian .
4. Meminimalkan adanya pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan mengadakan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Balung yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Lampiran-lampiran

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALUNG
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	94	94	10	11	12	13
1			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	85%	90%	95%		Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area: - Manajemen Perubahan; - Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Penataan dan Penguatan Organisasi; - Penataan Tata Laksana; - Penataan SDM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah	- Aparatur; - Penguatan Pengawasan Internal; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG

JL. RAMBIPUJI NO. 124 (0336) 6200051 BALUNG 68161

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	1. Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	1. Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah. 2. Nilai Sakip OPD

TUJUAN PD		SASARAN PD		PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan	93	624.314.100

TUJUAN PD			SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaraanya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	15 Dokumen	567.611.800
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaraanya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Daerah yang ada di Kecamatan	100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000 Laporan	56.702.300
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	85%				180.383.100

TUJUAN PD			SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Desa	80	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	7.220.800
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	173.162.300
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	100%				308.025.200

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.761.200
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	13 Laporan	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 Laporan	300.264.000

TUJUAN PD			SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	100%				2.912.131.188
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	26 Laporan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	2.406.153.588
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	93.960.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	30 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	39.506.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	20 Laporan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedia	1 Paket	9.690.300

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	96.340.800
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.043.200
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.899.000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16 Laporan	36.250.800
					Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	28 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Laporan	60.351.448

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	15.000.000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	55.198.752
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	25.411.400

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	33.523.900
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	23.802.000

Balung, 26 Januari 2024

CAMAT BALUNG



MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19700314 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN BALUNG

JL. RAMBIPUJI NO. 124 ☎ (0336) 6200051 BALUNG JEMBER 68161

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos

Jabatan : Camat Balung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

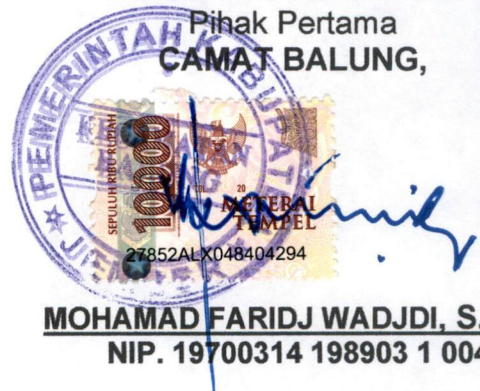
Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jember : 26 Januari 2024

Pihak Pertama
CAMAT BALUNG,



MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos
NIP. 19700314 198903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN BALUNG**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Balung	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (69)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.912.131.188	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 624.314.100	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 180.383.100	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 308.025.200	APBD
Jumlah	Rp. 4.024.853.588	

BUPATI JEMBER,


Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember : 26 Januari 2024
Pihak Pertama
Camat Balung,

MOHAMAD FARIDJ WAJDJI, S.Sos
NIP. 19700314 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG

JL. RAMBIPUJI NO. 124 ☎ (0336) 6200051 BALUNG 68161

**KEPUTUSAN CAMAT BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 22 /35.09.10/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Balung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Balung Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Balung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balung

Pada tanggal : 26 Januari 2024

CAMAT BALUNG



MOHAMAD FARIDJ WADJDI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19700314 198903 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN (PERANGKAT DAERAH)**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan</p>	- Seksi Pemerintahan	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan		<p>informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formasi perhitungan :</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang</p>	Sekcam	LAKIP

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Balung Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING KECAMATAN BALUNG

